



**KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI  
KEPEGAWAIAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023**

---

**I. LATAR BELAKANG**

**a) DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**b) GAMBARAN UMUM**

Pelayanan publik termasuk dalam salah satu tugas atau peran negara dalam menegakkan serta menjaga institusi publik yang dapat memberikan derajat kebermanfaatan tertinggi bagi masyarakat. Oleh karena itu, kinerja dari institusi penyedia pelayanan publik menjadi poin penting dalam memmanifestasikan tujuan negara.

Implementasi reformasi birokrasi merupakan suatu keharusan mengingat penyelenggaraan pemerintah saat ini dihadapkan dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja pemerintah. Pegawai Negeri Sipil

(PNS) di Indonesia yang terdiri dari 4,7 juta merupakan penggerak birokrasi pemerintah harus ikut serta dalam perubahan mendasar menuju pemerintahan yang baik dan bersih. Bergulirnya reformasi birokrasi, menuntut pengembangan aplikasi layanan kepegawaian menjadi hal yang krusial untuk mendukung agenda reformasi birokrasi khususnya pada peningkatan manajemen SDM, sehingga layanan kepegawaian mengalami perluasan fungsi tidak hanya sebagai penampil informasi data-data pegawai, namun juga memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam pengelolaan PNS dan selaku Instansi Pembina PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki memiliki peran strategis dalam mewujudkan manajemen kepegawaian Daerah yang handal, untuk menciptakan aparatur PNS yang bermoral, professional, netral, berwawasan global, menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sejak tahun 2017, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mengembangkan Aplikasi SKP Online, Aplikasi Presensi Online, Cuti Online dan layanan kepegawaian lainnya. Aplikasi SKP Online digunakan sebagai instrumen untuk melakukan penilaian kinerja PNS segi kuantitas, kualitas, waktu dan biaya sedangkan aplikasi Presensi Online digunakan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat perilaku kerja PNS dari segi kepatuhan dan kedisiplinan pegawai. Aplikasi cuti online digunakan untuk memberikan kemudahan kepada PNS dalam pengajuan cuti sesuai perraturan perundangan yang berlaku. Sampai dengan akhir tahun 2023 akan dikembangkan 44 layanan kepegawaian berbasis online untuk membantu mengakselerasi setiap layanan kepegawaian yang ujungnya untuk memberikan kemudahan bagi setiap PNS Provinsi Jawa Tengah.

Di sisi lain, hampir seluruh kelembagaan pemerintah di Indonesia telah memiliki SIM pengelola data kepegawaian, demikian pula halnya dengan pemerintah daerah baik itu Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota di Jawa Tengah. SIM pengelola data kepegawaian yang selanjutnya disebut Simpeg (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) dan target satu data Aparatur Sipil Nasional (ASN) nasional sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019, maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah menggarap Sistem Informasi ASN (SI-ASN) terintegrasi. Untuk langkah awal pengintegrasian sistem informasi ASN dilakukan melalui sinkronisasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang dikelola masing-masing instansi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) atau menjadi SIASN yang dikelola BKN.

Untuk menjembatani keberagaman dalam hal pengelolaan data Simpeg dan belum sinkronnya dengan data kepegawaian pada SAPK atau menjadi SIASN dimaksud, BKD Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah sesuai dengan kebutuhan layanan kepegawaian dan regulasi kepegawaian dengan harapan dapat menjadi sebuah portal informasi kepegawaian PNS se-Jawa Tengah dengan pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang akurat dan terintegrasi sehingga menjadi pengelolaan manajemen kepegawaian yang profesional dan unggul.

Perkembangan terbaru adalah adanya koneksi dua arah integrasi data SAPK dengan Simpeg Pemerintah Provinsi dan Kab/kota yang sudah berhasil dilaksanakan dengan menampilkan data SAPK pada Simpeg juga melakukan updating SAPK dari Simpeg Kab/Kota.

Kerangka Acuan Kerja Sistem Informasi Kepegawaian ini disusun untuk lebih mengoptimalkan dalam pengoperasian Pengelolaan Layanan Kepegawaian guna mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan mempunyai kompetensi untuk mengelola aplikasi layanan kepegawaian serta mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi Pemerintah Provinsi dan Kab/kota Se-Jawa Tengah. Rumusan langkah tindak lanjut tersebut dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Pengelolalan Sistem Informasi Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolalan Sistem Informasi Kepegawaian adalah sebagai berikut:

### **1. Maksud**

- a. Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.

- b. Mengoptimalkan pengoperasian dan integrasi layanan kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung pengelolaan data kepegawaian yang akurat dan *up to date*.
- c. Meningkatkan kompetensi pengampu kepegawaian SKPD dalam Pengelolaan layanan kepegawaian melalui penggunaan aplikasi layanan Kepegawaian beserta sub sistemnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan SAPK /SIASN sebagai sumber data kepegawaian yang dipergunakan dalam seluruh proses layanan data, pemanfaatan hasil data, dll serta mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan SAPK-BKN/SIASN.
- e. Memadukan dan mengintegrasikan data antara data Pemerintah Provinsi dan data Kabupaten/kota dengan data Sistem Pelayanan Kepegawaian (SAPK BKN).
- f. Mengembangkan sebuah mekanisme pengolahan data pada Aplikasi Portal layanan Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah melalui pengembangan modul pengolahan data.

## **2. Tujuan**

- a. Menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/keadaan umum kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menyajikan informasi data kepegawaian, sebagai bahan guna memenuhi kebutuhan unsur pimpinan dalam rangka perencanaan, pembinaan pegawai serta kebutuhan lainnya.
- c. Mempercepat dan mempermudah proses integrasi, pertukaran, pengumpulan dan penyebaran informasi kepegawaian antara SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Terwujudnya tenaga pengelola data kepegawaian di setiap SKPD yang kompeten dalam pengelolaan layanan kepegawaian.
- e. Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.
- f. Percepatan proses implementasi dan pelatihan mengenai aplikasi maupun modul baru pada aplikasi layanan kepegawaian.
- g. Terselenggaranya dukungan data PNS Kabupaten/Kota yang *up-to-date* pada Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah sehingga dapat dimanfaatkan pada kegiatan-kegiatan pengelolaan data kepegawaian khususnya yang melibatkan PNS Kabupaten/Kota;

- h. Terbentuknya kerjasama yang baik dalam pengelolaan data kepegawaian PNS antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sehingga tersedia data kepegawaian PNS se-Jawa Tengah yang akurat dan up-to-date.

### **III. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Guna mendukung tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud, Kegiatan Pengelolalan Sistem Informasi Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah ini akan dilaksanakan dalam bentuk:

1. Penyajian informasi kepegawaian melalui pencetakan Buku Profi Kepegawaian
2. Penyelenggaraan Bimbingan teknis (Bimtek) serta inventarisasi permasalahan dan kebutuhan melalui inventarisasi secara langsung ke SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mengundang pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Penyelenggaraan Rapat Teknis Penghubung Pengelolaan Layanan Kepegawaian pada UPT/Satker/Sekolah di Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Integrasi Simpeg dengan SAPK-BKN Pengelolaan data Kepegawaian Provinsi dan Kab/kota Se-Jawa Tengah.
5. Pembuatan dan Pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan Simpeg sejumlah 5 aplikasi;
6. Pengembangan Aplikasi Portal layanan Kepegawaian PNS Provinsi dan kab/kota se-Jawa Tengah.

### **IV. SASARAN**

Sasaran dari kegiatan ini Pengelolalan Sistem Informasi Kepegawaian adalah:

1. Tercapainya sebuah mekanisme *updating* data pada aplikasi layanan kepegawaian yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam pengelolaan kepegawaian khususnya bagi pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Memberikan *output* / keluaran berupa terbangunnya sebuah modul layanan Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah yang berfungsi sebagai sarana penguji informasi data PNS Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Jateng.

3. Tersosialisasinya program maupun inovasi layanan kepegawaian dan subsistem pendukungnya secara komprehensif dengan dukungan SDM yang berkompentensi tinggi.
4. Terbentuknya kesamaan pemahaman, pola pikir dan pola tindak antara pejabat pengelola kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta BKN dalam pemanfaatan SAPK, serta memecahkan masalah yang timbul;

**V. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini berlokasi di Semarang Jawa Tengah.

**VI. JADWAL KEGIATAN**

Jadwal Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

| NO | KEGIATAN   | TAHUN 2023 |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
|----|--|------------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|    |  | I          | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1  | Belanja ATK                                      |            |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
| 2  | Cetak dan Penggandaan                            |            |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
| 3  | Rapat Teknis Penghubung Kepegawaian 6 Wil Cabdin |            |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
| 4  | Koordinasi/Konsultasi/Monitoring                 |            |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
| 5  | Bimtek Pengembangan Simpeg                       |            |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
| 6  | Rakor Integrasi Simpeg dengan SAPK-BKN           |            |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
| 7  | Belanja Pembuatan / Pengembangan Aplikasi        |            |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |

**VII. KELUARAN**

Keluaran dari Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. terselesaikannya pengembangan subsistem/modul aplikasi pengelolaan kepegawaian sebanyak 5 aplikasi.
2. Tersajinya Buku Profil Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 60 buku.
3. Terlaksananya Rapat Teknis Penghubung Pengelolaan layanan Kepegawaian pada UPT/Satker/Cabdin/Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4. Terelesakannya pengembangan subsistem/modul Aplikasi Portal layanan Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah.
5. Terlaksananya Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan aplikasi Simpeg Pengelolaan layanan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah.
6. Terlaksananya Rapat Koordinasi (Rakor) Integrasi Simpeg dan SAPK-BKN tentang Pengelolaan data Kepegawaian Provinsi dan Kab/kota Provinsi Jawa Tengah.
7. Meningkatkan kompetensi pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal pengelolaan layanan kepegawaian.
8. Terbentuknya kerjasama yang baik dalam pengelolaan data kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga tersedia data kepegawaian yang akurat dan *up-to-date*.
9. Termanfaatkannya program aplikasi layanan kepegawaian dan subsistem pendukungnya di masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung layanan bidang kepegawaian.

#### **VIII. ANGGARAN**

Biaya penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang dikelola oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.

#### **IX. PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

**Semarang, Februari 2022**

**KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN**

  
  
**Drs. S U K A R D I. M.Si**  
Pembina  
NIP. 19690919 19901 1 001